

Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara

Azhar Suganda¹ Novi Ramadhini² Putri Nabila Harahap³ Joko Suharianto⁴
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}
Email: Azharsuganda30@gmail.com¹ noviramadhini64@gmail.com²
putrinabilahrp310@gmail.com³

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah, melibatkan sumber pendapatan dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan fokus pada data yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) terkait jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 45 sampel yang dianggap mewakili karakteristik khusus dari target populasi, sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, memanfaatkan sumber data sekunder dari kepustakaan dan manual. Analisis data dilakukan menggunakan *Software Eviews 12* dengan penerapan Uji Data Panel seperti Uji Chow dan Uji Hausman. Data terkait PAD di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan pada tahun 2021, dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan operasional bisnis selama pandemi COVID-19, khususnya pada sektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Peningkatan jumlah penduduk dalam suatu daerah secara umum dianggap dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi. Namun, analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak selalu berdampak positif terhadap PAD di semua daerah di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk kemajuan negara dengan keterlibatan aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian dalam pengelolaan negara dan upaya ini merupakan strategi yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, otonomi daerah dapat menjadi pondasi yang kokoh karena memungkinkan pemerintah daerah untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perubahan signifikan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Hal ini memberikan peluang besar bagi daerah untuk mengoptimalkan potensinya demi kesejahteraan masyarakat, sambil mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dengan mengelola sumber daya yang dimiliki, guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan luas kepada daerah Kabupaten atau Kota untuk merumuskan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara aktif.

Pelaksanaan otonomi daerah, seperti diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, membutuhkan dukungan personil, peralatan, dan pembiayaan yang memadai. Ini menjadi prasyarat penting agar pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diberikan. Pemerintah pusat juga mengalokasikan sumber pembiayaan kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa pendapatan daerah dalam konteks desentralisasi bersumber dari beberapa aspek, seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam mengelola pembangunan, yang mencakup sumber keuangan dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Diharapkan bahwa daerah otonom dapat mengelola sumber keuangan mereka sendiri untuk membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Sejak otonomi daerah, setiap daerah berusaha menggali potensi keuangan daerah melalui PAD. Dengan dilakukannya hal tersebut seharusnya pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah baik dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dapat dilihat dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menurun pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19. Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan yang diakibatkan adanya kebijakan pembatasan jam operasional usaha yang bertujuan memutus rantai COVID-19 di Sumatera Utara. Sehingga sektor usaha yang terdampak mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah seperti hotel, restoran, dan hiburan. Penurunan dalam penerimaan retribusi daerah yang diakibatkan pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah dalam menangani pandemi dan pemulihan ekonomi.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan daerah merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode waktu tertentu. Pendapatan asli daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan berbagai jenis pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan, Santosa dan Rahayu menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal langsung dari daerah itu sendiri, yang menjadi modal utama bagi daerah untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Syahrial & Sotuyo, 2014) Perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah, meskipun PAD tidak mampu sepenuhnya menutupi semua pengeluaran daerah. Salah satu cara untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi adalah dengan melihat seberapa besar nilai PAD yang dapat diperoleh oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang minim dapat menghambat suatu daerah dalam menjalankan proses pembangunan dan pemerintahan secara mandiri. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diharapkan mampu mandiri secara finansial. Mengingat tuntutan yang besar terhadap daerah untuk menjaga otonomi daerah, setiap daerah diharapkan untuk mengoptimalkan peran Pendapatan Asli Daerah di wilayahnya (Syam & Zulfikar, 2022)

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 per Kabupaten

Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Pertambahan (%)
Kota Medan	2018	1.636,20		
	2019	1.829,67	193,47	12
	2020	1.509,48	-320,19	-17
	2021	1.906,51	397,03	26
	2022	2.230,55	324,04	17

Binjai	2018	135,87		
	2019	108,95	-26,92	-20
	2020	112,27	3,32	3
	2021	91,99	-20,28	-18
	2022	66,79	-25,20	-27
Deli Serdang	2018	729,65		
	2019	825,38	95,73	13
	2020	809,72	-15,66	-2
	2021	926,14	116,42	14
	2022	1.041,67	115,53	12
Tebing Tinggi	2018	114,05		
	2019	105,24	-8,81	-8
	2020	90,98	-14,26	-14
	2021	82,93	-8,05	-9
	2022	88,75	5,82	7
Pematang Siantar	2018	137,05		
	2019	125,05	-12,00	-9
	2020	140,05	15,00	12
	2021	137,85	-2,20	-2
	2022	154,21	16,36	12
Labuhan Batu Utara	2018	57,01		
	2019	70,12	13,11	23
	2020	55,49	-14,63	-21
	2021	58,86	3,37	6
	2022	50,65	-8,21	-14
Karo	2018	159,19		
	2019	117,68	-41,51	-26
	2020	100,33	-17,35	-15
	2021	108,36	8,03	8
	2022	97,47	-10,89	-10
Serdang Bedagai	2018	194,38		
	2019	143,14	-51,24	-26
	2020	120,03	-23,11	-16
	2021	133,47	13,44	11
	2022	135,25	1,78	1
Simalungun	2018	164,11		
	2019	191,94	27,83	17
	2020	159,32	-32,62	-17
	2021	177,65	18,33	12
	2022	170,51	-7,14	-4

Berdasarkan data diatas, pada kota Medan pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 2.230,55 dan mengalami pertambahan sebesar 324,04 atau 17%, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2020 sebesar 1.509,48 dan mengalami pertambahan sebesar -320,19 atau -17 %. Pada kota Binjai pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 135,87, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2022 sebesar 66,79 dengan pertambahan -25,20 atau -27 %. Pada kabupaten Deli Serdang pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 1.041,67 dengan pertambahan 115,53 atau 12 %, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2018 sebesar 729,65. Pada kota Tebing Tinggi pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 82,93 dengan penambahan 82,93 atau -8,05 %, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2018 sebesar 114,05. Pada kota Pematang Siantar pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 154,21 dengan penambahan 16,36 atau 12 %, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2019 sebesar 125,05 dengan penambahan -12,00

atau -9%. Pada kabupaten Labuhan Batu Utara pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 70,12 dengan penambahan 13,11 atau 23%, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2022 sebesar 50,65 dengan penambahan -8,21 atau -14%. Pada kabupaten Karo pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2018 sebesar 159,19 sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2022 sebesar 97,47 dengan penambahan -10,89 atau -10%. Pada kabupaten Serdang Berdagai pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 194,38, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2020 sebesar 120,03 dengan penambahan -23,11 atau -16 %. Pada kabupaten Simalungun pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 191,94 dengan penambahan 27,83 atau 17 % sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2020 sebesar 159,32 dengan penambahan -32,62 atau -17%.

Pemerintah Sumatera Utara melalui Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya secara optimal dengan cara menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang berpotensi menjadi unggul dengan tujuan pembangunan ekonomi daerah dapat terealisasi. Dalam meningkatkan penerimaan PAD pemerintah Sumatera Utara dapat melihat beberapa factor seperti pertumbuhan penduduk dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sadono Sukirno (2004) menyatakan bahwa dimana pertumbuhan penduduk bukan suatu masalah, melainkan pengaruh jumlah penduduk pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan, karena semakin banyak orang maka semakin banyak ide, semakin banyak yang memiliki kreativitas, semakin banyak tenaga ahli, sehingga teknologi semakin berkembang (Pribadi, 2020). Selain itu semakin besar penduduk maka akan meningkatkan permintaan barang-barang konsumsi dan mendorong pendapatan daerah. Selain jumlah penduduk, faktor lain yang dapat mendukung adalah pengeluaran pemerintah. Teori Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi keberlangsungan agregat dan keberlangsungan harga. Sehingga, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran maka keberlangsungan agregat akan meningkat maka akan sejalan dengan peningkatan PAD.

Jumlah penduduk merupakan jumlah dari semua individu yang telah tinggal di sana selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang telah tinggal di sana untuk waktu yang lebih sedikit tetapi berniat untuk menetap. Politik, struktur sosial, dan ekonomi suatu wilayah semuanya dipengaruhi oleh populasinya, yang juga merupakan sumber daya atau beban Pembangunan. Jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk. Jumlah penduduk dapat memiliki dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak, dan penerimaan retribusi. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan penerimaan pajak dikarenakan adanya peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi penduduk (Sania et al., 2018). Sedangkan penerimaan retribusi dapat meningkat karena peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan retribusi daerah melalui aktivitas penduduk daerah seperti retribusi sampah, air, dan pelayanan umum (Rifqi, 2022)

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 per Kabupaten

Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Pertambahan (%)
Kota Medan	2018	2.264.145		
	2019	2.279.894	15.749	0,70
	2020	2.295.003	15.109	0,66
	2021	2.460.858	165.855	7,23
	2022	2.494.512	33.654	1,37
Binjai	2018	273892		
	2019	276597	2.705	0,99
	2020	279302	2.705	0,98

	2021	295361	16.059	5,75
	2022	300009	4.648	1,57
Deli Serdang	2018	2155625		
	2019	2195709	40.084	1,86
	2020	2234320	38.611	1,76
	2021	1941374	-292.946	-13,11
	2022	1.953.986	12.612	0,65
Tebing Tinggi	2018	162581		
	2019	164402	1.821	1,12
	2020	166100	1.698	1,03
	2021	174969	8.869	5,34
	2022	177785	2.816	1,61
Pematang Siantar	2018	253500		
	2019	255317	1.817	0,72
	2020	257110	1.793	0,70
	2021	270768	13.658	5,31
	2022	274056	3.288	1,21
Labuhan Batu Utara	2018	360926		
	2019	363816	2.890	0,80
	2020	366603	2.787	0,77
	2021	385869	19.266	5,26
	2022	390954	5.085	1,32
Karo	2018	409675		
	2019	415878	6.203	1,51
	2020	421997	6.119	1,47
	2021	409077	-12.920	-3,06
	2022	414429	5.352	1,31
Serdang Bedagai	2018	614618		
	2019	616396	1.778	0,29
	2020	617772	1.376	0,22
	2021	662076	44.304	7,17
	2022	667998	5.922	0,89
Simalungun	2018	863693		
	2019	867922	4.229	0,49
	2020	871678	3.756	0,43
	2021	1003727	132.049	15,15
	2022	1021615	17.888	1,78

Berdasarkan data diatas, pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2022. Pada kota Medan sebesar 2.494.512 dengan penambahan 33.654 atau 1,37 %. Pada kota Binjai sebesar 300009 dengan penambahan 4.648 atau 1,57%. Pada kabupaten Deli Serdang sebesar 1.953.986 dengan penambahan 12.612 atau 0,65%. Pada kota Tebing Tinggi sebesar 177785 dengan penambahan 2.816 atau 1,61%. Pada kota Pematang Siantar sebesar 274056 dengan penambahan 3.288 atau 1,21%. Pada kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 390954 dengan penambahan 5.085 atau 1,32%. Pada kabupaten Karo sebesar 414429 dengan penambahan 5.352 atau 1,31%. Pada kabupaten Serdang Bedagai sebesar 667998 dengan penambahan 5.922 atau 0,89%. Pada kabupaten Simalungun sebesar 1021615 dengan penambahan 17.888 atau 1,78%. Sedangkan seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk yang terendah pada tahun 2018. Pada kota Medan sebesar 2.264.145 . Pada kota Binjai sebesar 273892. Pada kabupaten Deli Serdang sebesar 2155625. Pada kota Tebing Tinggi sebesar 162581. Pada kota Pematang Siantar sebesar 253500. Pada kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 360926. Pada kabupaten Karo sebesar 409675. Pada kabupaten Serdang Bedagai sebesar 614618. Pada kabupaten Simalungun sebesar 863693. Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah penduduk tidak selalu

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan yang naik sekitar 0,66% dari tahun sebelumnya sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurun sekitar 17%. Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang jumlah penduduknya meningkat dari tahun ke tahun namun tidak diiringi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Kota Binjai peningkatan jumlah penduduk terjadi setiap tahun, namun penurunan PAD terjadi pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Pada Kabupaten Deli Serdang peningkatan jumlah penduduk di tahun 2020 menurunkan PAD sebesar 1,90%, sedangkan di tahun 2021 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar -13% namun PAD meningkat sebesar 14%. Pada Kota Tebing Tinggi kenaikan jumlah penduduk namun tidak diikuti kenaikan PAD terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Pada Kota Pematang Siantar kenaikan jumlah penduduk sebesar 5,3% diikuti penurunan PAD sebesar 1,57%. Pada Kabupaten Labuhan Batu Utara jumlah penduduk di tahun 2020 meningkat sebesar 0,70% sedangkan PAD mengalami penurunan sebesar 20,86%, hal yang sama terjadi pada tahun 2022 peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,31%, sedangkan PAD mengalami penurunan sebesar 13,95%. Pada Kabupaten Karo terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,51% di tahun 2019 dan 1,47% di tahun 2020, sedangkan PAD menurun sebesar 26,08% di tahun 2019 dan 14,74% di tahun 2020. Pada Kabupaten Serdang Bedagai peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,22% di tahun 2019 tidak diikuti peningkatan PAD yang menurun sebesar 26,26%. Hal yang serupa terjadi di tahun 2020 peningkatan jumlah penduduk sebesar 7,17% menurunkan PAD sebesar 16,15%. Terakhir, pada Kabupaten Simalungun terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,43% di tahun 2020 dan sebesar 1,78% di tahun 2022, serta diikuti dengan penurunan jumlah PAD sebesar 16,99% di tahun 2020 dan 4,02% di tahun 2022.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai faktor jumlah penduduk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun hasil yang didapatkan masih beragam yang ditunjukkan oleh peneliti terdahulu. Pada penelitian (Asmuruf F et al., 2015) berjudul Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk terhadap PAD di Kota Sorong berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Jumaidi, 2022) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di D.I. Yogyakarta Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19 disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan secara efisien dan bijak, akan memastikan investasi yang tepat sasaran dan penyediaan layanan publik yang berkualitas yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah menjadi sebuah kunci utama dalam menjaga suatu stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk mendanai operasi pemerintah suatu negara dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah dapat berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nahumuri, n.d.). Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai indikator besar kecilnya kegiatan yang didanai pemerintah belanja publik, serta dapat memicu aktivitas ekonomi di suatu daerah yang akan meningkatkan PAD (Hamdani et al., 2023). Kegiatan

ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatankegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD (Sitaniapessy, 2013).

Tabel 3. Jumlah Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 per Kabupaten

Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertambahan (Rp)	Pertambahan (%)
Kota Medan	2018	4.215.003.353		
	2019	5.080.725.686	865.722.333	21
	2020	3.993.254.231	-1.087.471.455	-21
	2021	5.346.465.514	1.353.211.283	34
	2022	6.722.198.862	1.375.733.348	26
Binjai	2018	934603499		
	2019	908429167	-26.174.332	-3
	2020	847590870	-60.838.297	-7
	2021	1023535827	175.944.957	21
	2022	873374032	-150.161.795	-15
Deli Serdang	2018	3422610573		
	2019	3612907370	190.296.797	6
	2020	3274161221	-338.746.149	-9
	2021	4026683296	752.522.075	23
	2022	4.229.535.000	202.851.704	5
Tebing Tinggi	2018	746857086		
	2019	712955521	-33.901.565	-5
	2020	654639073	-58.316.448	-8
	2021	776303362	121.664.289	19
	2022	726730425	-49.572.937	-6
Pematang Siantar	2018	994512016		
	2019	948523364	-45.988.652	-5
	2020	911986217	-36.537.147	-4
	2021	920352930	8.366.713	1
	2022	999032274	78.679.344	9
Labuhan Batu Utara	2018	976397417		
	2019	1138528034	162.130.617	17
	2020	977399205	-161.128.829	-14
	2021	1025274904	47.875.699	5
	2022	999272219	-26.002.685	-3
Karo	2018	1397789814		
	2019	1531356154	133.566.340	10
	2020	1332057898	-199.298.256	-13
	2021	1363562334	31.504.436	2
	2022	1344362554	-19.199.780	-1
Serdang Bedagai	2018	1565790906		
	2019	1577040180	11.249.274	1
	2020	1519836306	-57.203.874	-4
	2021	1487563904	-32.272.402	-2
	2022	1557615141	70.051.237	5
Simalungun	2018	2269698962		
	2019	2347472353	77.773.391	3
	2020	2138512293	-208.960.060	-9
	2021	2252487064	113.974.771	5
	2022	2309529330	57.042.266	3

Berdasarkan data diatas, pada kota Medan jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6.722.198.862 dengan penambahan 1.375.733.348 atau 26%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2020 sebesar 3.993.254.231 dengan penambahan 1.087.471.455 atau -21%. Pada kota Binjai jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1023535827 dengan penambahan 175.944.957 atau 21%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2020 sebesar 847590870 dengan penambahan -60.838.297 atau -7%. Pada kabupaten Deli Serdang jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4.229.535 dengan Penambahan 202.851.704 atau 5%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2020 sebesar 3274161221 dengan penambahan -338.746.149 atau -9%. Pada kota Tebing Tinggi jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2021 sebesar 776303362 dengan penambahan 121.664.289 atau 19%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2020 sebesar 654639073 dengan penambahan -58.316.448 atau -8%. Pada kota Pematang Siantar jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 999032274 dengan penambahan 78.679.344 atau 9%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2020 sebesar 911986217 dengan penambahan -36.537.147 atau -4%. Pada kabupaten Labuhan Batu Utara jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1138528034 dengan penambahan 162.130.617 atau 17%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2018 sebesar 976397417. Pada kabupaten Karo jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1531356154 dengan penambahan 133.566.340 atau 10%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2020 sebesar 1332057898 dengan penambahan -199.298.256 atau -13%. Pada kabupaten Serdang Bedagai jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1577040180 dengan penambahan 11.249.274 atau 1%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2021 sebesar 1487563904 dengan penambahan -32.272.402 atau -2%. Pada kabupaten Simalungun jumlah belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 2309529330 dengan penambahan 57.042.266 atau 3%, sedangkan jumlah belanja pemerintah terendah pada tahun 2020 sebesar 2138512293 dengan penambahan -208.960.060 atau -9%.

Menurut Mankiw dalam Ardiyanto (2012) menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat (Dwi Prakarsa, 2014). Namun, pada kenyataannya kenaikan pengeluaran pemerintah tidak selalu akan menaikkan dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini terjadi di Kota Binjai tahun 2020, penurunan pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 6,6% sedangkan PAD mengalami kenaikan sebesar 3,05% dari tahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pada Kota Tebing Tinggi kenaikan pengeluaran pemerintah tahun 2021 sebesar 18,58% sedangkan penurunan pendapatan asli daerah terjadi sebesar 8,85%. Pada Kota Pematang Siantar hal ini terjadi pada tahun 2019, penurunan sebesar 3,85% terjadi sedangkan pendapatan asli daerah naik 12% dari tahun sebelumnya. Pada Kabupaten Karo pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 9,55% di tahun 2019 sedangkan tidak diikuti jumlah PAD yang menurun sebesar 26,08%. Terakhir pada Kabupaten Simalungun peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 2,53% sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah menurun sekitar 4,02%.

Penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini adalah penelitian (Sitaniapessy, 2013) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan secara simultan dan parsial oleh

pengeluaran pemerintah dengan menggunakan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, dan perdagangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan (L.K Hastuti et al., 2016) dalam judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan PDRB Terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2014 mendapatkan hasil bahwa Pengeluaran Pemerintah mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan ini, terdapat adanya keterkaitan antar variabel. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara”.

Kajian Teori

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004: 94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh suatu wilayah dari sumber-sumber di dalamnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki peranan yang signifikan karena dari sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu wilayah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan wilayah tersebut. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian suatu wilayah otonom. Kemandirian wilayah otonom diukur berdasarkan seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran wilayah tersebut, terutama dalam belanja rutin wilayah. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD, semakin tinggi tingkat kemandirian wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD, semakin besar ketergantungan wilayah tersebut pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan wilayah dalam mendukung pengeluaran wilayah tersebut.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang no. 25 tahun 1999, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. Pajak Daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua kategori: pajak asli daerah dan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis pajak daerah termasuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan dan pengolahan bahan galian, parkir, kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan di atas air, bahan bakar kendaraan bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan permukaan.
2. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan bagian dari PAD dan merupakan pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Jenis-jenis retribusi ini meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Meliputi bagian laba, deviden, penjualan saham milik daerah, dan retribusi perijinan tertentu.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Merupakan bagian PAD yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Termasuk di sini penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro, biaya pembinaan dan pengawasan tempat pelelangan ikan, setoran cicilan utang, setoran biaya

pembinaan lembaga keuangan desa, biaya prakualifikasi, dan lain-lain. Meskipun berasal dari berbagai sumber, kontribusi terbesar dalam PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dari kedua sumber ini dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan keadaan.

Jumlah Penduduk

Dalam bahasa Yunani, "Demos" merujuk pada penduduk atau rakyat, yang menjadi elemen kunci dalam perkembangan ekonomi, berfungsi sebagai motor penggerak serta pelaksanaan ekonomi dan juga sebagai sumber tenaga kerja. Kehadiran penduduk dalam suatu wilayah memiliki aspek positif dan negatif. Dari segi positif, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi dorongan bagi perkembangan wilayah tersebut. Namun, keberadaan jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang proporsional. Oleh karena itu, jumlah penduduk dalam sebuah wilayah memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih realistis (Perwira Jaya, Widanta, 2014: 204-205). Jumlah penduduk adalah jumlah individu yang sah secara hukum yang tinggal dalam suatu wilayah atau negara serta mematuhi regulasi yang berlaku di wilayah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk; kenaikan jumlah penduduk dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Penduduk memiliki peran sebagai sumber daya utama yang sangat mempengaruhi proses pembangunan dalam suatu wilayah.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah, yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004), merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk tingkat nasional dan APBD untuk tingkat daerah/regional (Sitaniapessy, 2013: 40). Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, serta kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang diterapkan. Ketika pemerintah memutuskan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah menjadi gambaran biaya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yakni teori makro dan teori mikro. Dalam konteks ini, fokus pada teori dari segi makro. Teori makro tentang pengeluaran pemerintah telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, dan terbagi dalam tiga golongan, seperti model pembangunan terkait pertumbuhan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner yang mengaitkan dengan aktivitas pemerintah, dan teori Peacock serta Wiseman.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD

Widarjono (Budiharjo, 2003:159) menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan, jumlah penduduk yang besar di Indonesia dianggap sebagai potensi besar untuk pembangunan, namun juga merupakan tanggungan. Jumlah penduduk dianggap sebagai potensi jika dapat meningkatkan produksi nasional. Sebaliknya, jika struktur, penyebaran, dan kualitasnya tidak sesuai, hal itu dapat mengakibatkan pelayanan sosial yang terbebani dan rendahnya tingkat produksi, yang pada gilirannya menjadi beban bagi penduduk yang bekerja secara efektif. Signifikansi variabel jumlah penduduk terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak dan retribusi di suatu daerah juga disoroti oleh Norfidwitya (2014:27). Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk dapat berdampak pada tingkat pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan pendapatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi suatu daerah sangat bergantung pada ukuran jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan kebijakan

pemerintah. Karena itu, jumlah penduduk memainkan peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi di daerah tersebut.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan pembelian barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori makro tentang pengembangan pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan menurut Guritno (1994: 169-170) sebagaimana diuraikan oleh Santosa dan Rahayu (2005, 12-13):

1. Model Pembangunan Terhadap Perkembangan Pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, yang menyambungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang berbeda. Tahap awal pembangunan memerlukan pengeluaran pemerintah besar untuk investasi utama, seperti infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Tahap tengah berfokus pada investasi untuk pertumbuhan ekonomi, sementara tahap lanjut menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Peningkatan infrastruktur (investasi pemerintah) diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi dan potensi pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Hukum Wagner. Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam ekonomi, jika pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga akan meningkat. Prinsip ini berdasarkan pengamatan pada negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada peningkatan PAD melalui pajak daerah.
3. Teori Peacock dan Wiseman. Teori ini mengemukakan bahwa pemerintah cenderung memperbesar pengeluarannya. Namun, masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menaikkan pajak. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pemungutan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran pemerintah. Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak bergerak lurus, melainkan seperti tangga. Terlebih lagi, pengeluaran ini dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang menjadi fokus adalah keseluruhan data yang telah dipublikasikan oleh BPS mengenai jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu dari target populasi yang sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian (Martono, 2010). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 45. Dalam konteks ini, sampel yang diambil dari populasi harus secara tepat merepresentasikan keseluruhan populasi (Sugiono, 2008). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu melalui pengumpulan data sekunder dengan kepustakaan dan manual (Harahap, 2018). Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik analisis data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program *views 12*. Adapun uji yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah Uji Data Panel yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	258.502636	(8,34)	0.0000
Cross-section Chi-square	185.593233	8	0.0000

Berdasarkan hasil uji chow diatas, Hasil cross section F sebesar $0.0000 < 0.05$ yang berarti bahwa uji ini menolak hipotests H_0 atau uji ini menggunakan model *fixed effect* (FE).

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.414345	2	0.0405

Berdasarkan hasil uji hausman diatas, hasil prob cross section yaitu $0.0405 < 0.05$ yang berarti bahwa uji ini menolak H_0 atau dapat diputuskan bahwa uji ini sesuai dengan model *fixed effect* (FE).

Tabel 6. Hipotesis Model Fixed Effect (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-77.54111	57.85665	-1.340228	0.1891
Jumlah Penduduk	-3.49E-05	6.95E-05	-0.502172	0.6188
Belanja	2.55E-07	1.17E-08	21.73281	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998311	Mean dependent var	391.1547	
Adjusted R-squared	0.997814	S.D. dependent var	571.8125	
S.E. of regression	26.73596	Akaike info criterion	9.618483	
Sum squared resid	24303.59	Schwarz criterion	10.06011	
Log likelihood	-205.4159	Hannan-Quinn criter.	9.783118	
F-statistic	2009.251	Durbin-Watson stat	2.313668	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil hipotesis diatas, diketahui F-Statistic yaitu 2009.251 > F-Tabel yaitu 19,00 dan nilai prob f yaitu 0.000000 yang berarti bahwa variabel independen yaitu Jumlah Penduduk dan Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022. Nilai t-hitung variabel belanja pemerintah di Sumatera Utara sebesar 21,73281 dan t-tabel 12,70620474, maka nilai t-hitung > nilai t-tabel dengan nilai probabilitas $0.0000 > 0,05$ yang berarti variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. nilai t-hitung pada variabel jumlah penduduk yaitu -0.502172 dan nilai t-tabel 12,70620474 maka nilai t-hitung < nilai t-tabel dengan nilai probabilitas $0.0000 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien Determinasi (R^2) di Sumatera Utara sebesar 0,998311 atau 99,83 % yang berarti bahwa hubungan variabel bebas jumlah penduduk dan belanja pemerintah dapat menjelaskan variabel terikat pendapatan asli daerah sebesar 99% sedangkan sisanya 0,17% dijelaskan oleh variabel lain.

KESIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh suatu wilayah dari sumber-sumber di dalamnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan

berlandaskan pada hukum yang berlaku. Jumlah penduduk adalah jumlah individu yang sah secara hukum yang tinggal dalam suatu wilayah atau negara serta mematuhi regulasi yang berlaku di wilayah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk; kenaikan jumlah penduduk dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah, merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk tingkat nasional dan APBD untuk tingkat daerah/regional. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat. Dari Hasil penelitian bahwa variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hubungan variabel bebas jumlah penduduk dan belanja pemerintah dapat menjelaskan variabel terikat pendapatan asli daerah sebesar 99% sedangkan sisanya 0,17% dijelaskan oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuruf F, M., Rimate, A. V., & Kawung, M. V. G. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 727–737.
- Dwi Prakarsa, F. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012).
- Hamdani, I., Sri Nesta, N., Rahmawati, J., & Hidayat, F. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 167–183. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.887>
- Harahap, I. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif; Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 51–63.
- Jumaidi, A. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di D.I. Yogyakarta Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 96–116.
- L.K Hastuti, D., Kadarisman, E., & Rohman, A. A. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 1241–1254.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)* (p. 9). P.T Raja Grafindo .
- Nahumuri, L. L. (n.d.). *Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah*.
- Pribadi, S. M. (2020). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah provinsi Kalimantan Timur [Skripsi]*. Universitas Mulawarman.
- Rifqi, M. N. (2022). *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Labuh Baru Barat berdasarkan Peraturan daerah No. 10 tahun 2012 tentang Persampahan/Kebersihan [Skripsi]*. Universitas Islam Riau.
- Sania, H., Anggra Yunita, E., & Muttaqin, I. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Permana*, IX(2).
- Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1), 38–51.

- Syahrial, & Sotuyo. (2014). Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5).
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>